

POLA PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM BIDANG PARIWISATA

Oleh : Bambang Supriadi

ABSTRAK: Tujuan Penelitian ini adalah menemukan pola Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berbasis Kompetensi bidang Pariwisata yang dapat mencetak sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pariwisata. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Input, Proses dan Output Pendidikan Luar Sekolah ini dapat menghasilkan Lulusan yang berkualitas dan dapat memiliki Daya saing tinggi. Pola PLS Bidang Pariwisata ini diupayakan dapat memberikan suatu kesatuan konsep yang terdiri dari : kognitif, psikomotorik dan afektif terhadap pola kerja aktifitas dalam industri pariwisata. Dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi era kompetisi di industri pariwisata. Metode penelitian ini, menggunakan analisis diskriptif untuk menjawab permasalahan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah (pendidikan kursus selama satu tahun) dalam penyelenggaraannya/sistemnya. Berdasar persoalan tersebut diatas, maka penelitian ini telah menunjukkan bahwa kualitas Sistem Pendidikan Luar Sekolah ini masih relatif rendah. Sehingga perlu pembenahan dalam komponen Input, Proses Dan Outputnya untuk mendapatkan hasil pendidikan yang maksimal.

Kata-kata Kunci: Kualitas, Pendidikan Luar Sekolah, Pariwisata

Kualitas SDM kita masih relatif rendah, dan tentunya kita masih punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Seperti kita ketahui, bahwa

rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang

melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh angka putus sekolah, hal yang sama disebabkan oleh factor ekonomi,. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan non formal tersebut.

Menurut Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Kemendiknas Hamid Muhammad. Bahwa perlunya Pembinaan dan penertiban lembaga kursus pelatihan dengan baik dan benar. Dia menyebut, saat ini telah tercatat 11 ribu lebih lembaga kursus yang mengantongi nomor induk lembaga. Karena itu, Kemendiknas akan memverifikasi apakah lembaga tersebut betul-betul beroperasi dan memberi layanan pendidikan yang baik dan Ke depan, Kemendiknas hanya akan membina, mengembangkan, dan memfasilitasi lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan minimum. Selebihnya lembaga-lembaga on-off itu bakal diberi pilihan. Dibina lebih lanjut selama dua hingga tiga tahun sampai betul-betul memenuhi standar atau disarankan memilih bidang lain sebagai core bisnisnya. Dengan begitu, tidak mengganggu layanan lembaga kursus seperti yang disyaratkan Kemendiknas

(METRO NEWS, SABTU, 06 FEBRUARI 2010).

Ditegaskan lagi dalam Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggung jawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah:

Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini; peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B setara SLTP; penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional; perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orang tua (Parenting); perluasan, pemerataan dan peningkatan

Kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus; dan memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini diberbagai daerah di Riau.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang perlu disusun Rencana strategis adalah : Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS; Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas dan hasil; meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus; Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakeholder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta Melaksanakan penelitian kesesuaian program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Strategi PLS dalam rangka era

otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah;
2. Pembinaan kelembagaan PLS;
3. Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat;
4. Mengembangkan system komunikasi dan informasi dibidang PLS;
5. Meningkatkan fasilitas dibidang PLS.

Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja.

Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri.

Di dalam pengembangan PendidikanLuar Sekolah, yang perlu menjadi perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat membaca dan merebut peluang

dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki tanggungjawab yang sama.

Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan perempuan.

Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah Pendidikan Luar Sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke depan. PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan secara pengendali, PLS perlu mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus memberi perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS sebagai salah satu solusi

terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah.

Pariwisata dengan mendatangkan tenaga ahli dalam bidang ini untuk mendidik dan mencetak output yang dapat diharapkan khususnya bagi negara yang berkembang hal ini tidak sekedar bagaimana mendapatkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidang pariwisata? lebih dari itu adalah instrumen-instrumen yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana menunjang terhadap pembekalan Sumber daya Manusia dalam bidang Pariwisata.

Usaha setiap negara dalam mengembangkan industry pariwisata yang pesat dan mewujudkan angan-angan menjadi negara terbesar dalam jumlah kunjungan wisatawan, hampir setiap negara ini selalu berpacu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut di atas tidak lain adalah melalui peningkatan efektifitas sistem pendidikan dan latihan dalam bidang pariwisata.

Di Indonesia khususnya kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga tentang prosentase jumlah kunjungan wisman relatif tinggi, sehingga bias dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mencapai jumlah kunjung

an wisman di tingkat ASEAN, dengan bukti kurun waktu tiga tahun dari tahun 2007-2009 arus kunjungan wisatawan ke Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 14% per tahun ini suatu rekor pertumbuhan tertinggi.

Sangat menggembirakan bagi bangsa Indonesia melihat hasil kenyataan perhiungan statistik di atas, akan tetapi kalau kita meneliti lebih dalam dengan keberadaan Sumber Daya Manusia dalam bidang pariwisata ini di Indonesia, masih memprihatinkan karena sekian banyak industry pariwisata di Indonesia seperti hotel, restoran, travel agent dan Airlins dan lain-lain. Masih banyak menggunakan tenaga kerja asing terutama pada level midel manajer ke atas. Ini sebuah tantangan yang harus dicari jawabannya.

Indonesia memang masih mudah kalau berbicara tentang SDM bidang pariwisata ini karena melihat dari sejarah pariwisata, Indonesia baru tahun 1958 mulai aktif bergerak dalam bidang ini bersamaan dengan ditemukan istilah baru yaitu; "PARIWISATA" sebagai peenganti istilah "TOURISM".

Kondisi semacam ini tidak boleh mematahkan semangat justru seharusnya akan menjadikan suatu tantangan yang harus

di hadapi dengan kerja keras untuk menyusul negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu yang perlu yang perlu pertama diperhatikan dan perlu dikerjakan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam menangani berbagai aktifitas dalam bidang pariwisata.

Sumber Daya Manusia yang profesional tersebut dapat dicapai salah satunya dengan jalan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas keterampilan dan pengetahuannya, inilah saat yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia dalam membina dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pariwisata selaras dengan perkembangan jumlah wisatawan mancanegara semakin tinggi.

Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini, diharapkan mereka memiliki keterampilan yang memadai dan pengetahuan yang luas sehingga dapat diterima bekerja di industry-industri pariwisata secara profesional dan kompetitif dengan tenaga kerja asing.

Sesuai dengan Kepres : "Indonesia memerlukan tenaga kerja yang berpengetahuan luas, terampil dan ahli, hal ini bias dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan dengan cara meningkatkan dan memperluas

lembaga-lembaga pendidikan”.

Dengan kata lain tumbuhnya industri-industri pariwisata yang semakin pesat maka konsekuensinya harus diikuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang spesifik, sehingga untuk merealisasi kepres atau harapan-harapan tersebut adalah diadakannya pemantapan dan pengembangan kepada lembaga-lembaga pariwisata secara terpadu dan sistematis berdasar standar kebutuhan lapangan.

Lembaga-lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pariwisata dan banyak dibutuhkan oleh kalangan industri-industri pariwisata ini, khususnya adalah : lembaga-lembaga Pendidikan Luar Sekolah (PLSO dalam bidang pariwisata, yang sekarang ini mulai bermunculan hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia, dengan lama program satu tahun.

Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini membutuhkan perhatian terhadap kualitas penyelenggaraannya artinya perlu pemantapan efisiensi sistem pendidikan, sehingga sistem yang dipakai harus memiliki standard an betul-betul berorientasi terhadap lapangan kerja.

Mengingat Pendidikan Luar Sekolah ini jangka waktunya

pendek dan selalu menjanjikan masyarakat cepat untuk mendapat kerja, dan industry pariwisata sendiri juga sangat membutuhkan, akibatnya kalau tidak ada pemantapan terhadap kualitas system pendidikan yang ada akan merugikan negara dan khususnya diri sendiri, untuk menjalin hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dan industry pariwisata, maka Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini harus dapat memberi bekal keterampilan yang sangat relevan dan memadai.

Sesuai dengan pendapatnya J. Spillane; Jumlah perjalanan internasional oleh wisatawan manca negara semakin lama semakin bertambah, sehingga Indonesia lebih dikenal oleh wisatawan manca negara. Oleh karena itu kalau tidak ada perencanaan akan pentingnya persediaan pelayanan khususnya dalam bidang pariwisata akan timbul banyak kesulitan dalam hal komunikasi antara/dengan wisatawan manca negara, sehingga program pendidikan pariwisata harus diperluas sampai seberapa besar daerah/ wilayah wisata.

Melihat kondisi Pendidikan Luar Sekolah dalam bidang pariwisata tersebut, satu sisi menyenangkan dan disisi lain memprihatinkan, mengapa harus demikian? Karena Pendidikan

Luar Sekolah dalam bidang pariwisata ini masih belum memiliki standar sistem pendidikan terutama kurikulum dan materi perkuliahannya, buktinya antara Pendidikan Luar Sekolah satu dengan yang lainnya masih memiliki pola kurikulum sendiri-sendiri salah satunya adalah jumlah dan bentuk materi yang diberikan pada siswa, atau dengan kata lain kurikulum yang sudah tersedia atau dibakukan masih belum bisa berorientasi pada lapangan kerja.

Akibat yang ditimbulkan dengan lemahnya standarisasi sistem pendidikan ini adalah outputnya tidak bisa siap kerja seperti yang diharapkan oleh lapangan kerja yaitu industri-industri yang bergerak dalam bidang pariwisata, baik industri hotel dan restoran, industri biro perjalanan dan industri lainnya, misalnya kasus yang terjadi di Pendidikan Luar Sekolah ini yaitu tidak memberikan nama jurusan berdasar spesialisasinya, artinya ada nama untuk dua jurusan perhotelan dan jurusan pariwisata keduanya disatukan dalam satu jurusan yaitu "jurusan perhotelan dan pariwisata". Mana dari jurusan itu yang dipelajari, perhotelannya?, Pariwisata(travel)?, atau kedua-duanya?, mengingat

program belajar di lembaga ini hanya 1 (satu) tahun.

Saat ini Industri Pariwisata menghadapi masalah, produktivitas dan kualitas produk, ketenagakerjaan dan hubungan dengan masyarakat sekitar. PKBM-Perusahaan bisa mengatasi sebagian besar masalah tersebut melalui peningkatan kemampuan dan motivasi kerja, hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan dan serikat pekerja, serta dengan masyarakat sekitar disamping juga antara karyawan dengan keluarganya. Layanan yang diberikan meliputi pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan dasar dan umum, pendidikan perempuan, dan pendidikan usia dini.

Sehingga hal ini perlu dikembangkan sistem pendidikan luar sekolah yang professional, meliputi:

1. Komponen Input

Suatu potensi komponen input dalam sistem manajemen sangat menentukan kualitas output. Beberapa komponen input yang terkait dengan sistem manajemen lembaga pendidikan adalah :

Kondisi calon siswa. Hal yang mendasar mengenai kondisi calon siswa adalah semakin baik kualitas input (calon siswa), maka akan semakin memudahkan dan mempercepat proses untuk menjadikan

output (kelulusan) yang berkualitas, hal ini amat penting bagi upaya pendidikan pendidikan dalam rangka mencapai mutu optimal, sehingga efisiensi dan efektivitas suatu lembaga tinggi akan terjamin.

Sebenarnya semakin rendah kualitas input, maka semakin sulit dan memerlukan waktu atau pun energi yang lebih besar dalam memprosesnya, sehingga efisiensinya menjadi kurang. Dalam konteks pendidikan dan pemerataan, hal tersebut penting untuk menjamin hak azasi individu terutama individu input yang kurang bermutu, sehingga untuk mencapai mutu minimum diperlukan waktu yang jauh lebih lama. Atas dasar ini pula maka pembatasan waktun studi harus diperhatikan dan dicarikan kebijakan yang lebih baik.

Kondisi calon siswa pada kenyataannya sangat tergantung pada potensi yang dimiliki calon dari hasil pendidikan sebelumnya, yaitu semenjak sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ditegaskan dari hasil penelitiannya Abdul Kadir menyatakan bahwa "Daya serap lulusan SD,SMTP, dan SMTA terhadap materi pelajaran hanyalah sebesar 35%. Artinya, lulusan SD yang akan masuk SMTP pada dasarnya hanya menguasai sekitar 35% dari keseluruhan

materi pelajaran yang diberikan dan sudah barang tentu kondisi ini berlanjut hingga pendidikan pada tingkat lanjutannya.

Secara akumulatif kondisi tersebut akan mempengaruhi pada jenjang pendidikan selanjutnya sehingga dunia Pendidikan Luar Sekolah khususnya dalam bidang pariwisata musti rela menerima potensi calon siswa secara mental, inteljensi dan baik secara fisik. Mengingat kondisi user yaitu Industri hotel yang akan menerima lulusan lembaga ini telah memiliki kreteria calon karyawan.

Dari segi mental menurut industri hotel adalah karyawan harus dapat bersikap ramah tamah dalam menghadapi tamu dan sopan dalam dalam komunikasi dan santun dalam memberikan servis, karena ramah tamah in merupakan modal bagi hotel untuk mempromosikan produk jasa yang mereka miliki, sehingga kondisi input dalam seleksi calon siswa yang akan belajar pada pendidikan pariwisata ini perlu instrumennya diarahkan untuk mengetahui kadar hospitality ini.

Dari segi inteljensi juga merupakan faktor dominan dalam menentukan penerimaan calon siswa di lembaga pendidikan bidang pariwisata ini mengingat

pekerjaan di industri hotel ini sangat luas dan kompleks yang perlu pemikiran dan daya nalar seorang karyawan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam industri ini dan pemikiran pengembangan untuk ekspansi usaha serta untuk menghadapi daya saing usaha.

Kondisi yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah kondisi fisik seorang karyawan, oleh Karena itu untuk mendapat calon siswa yang sesuai dengan harapan di industri perhotelan, maka Pendidikan Luar Sekolah ini harus mencari persyaratan yang sesuai dengan permintaan hotel khususnya tentang kondisi fisik, yang menyangkut antara lain :

1. Tinggi badan
2. Berat badan
3. Bentuk rambut
4. Kebersihan kulit
5. Cara berkomunikasi

Karena persyaratan tersebut sudah menjadi kebutuhan hampir di setiap industri pariwisata yang membutuhkan perfomen bagi karyawannya khususnya di industri perhotelan.

2. Komponen proses

Setelah komponen input maka selanjutnya adalah komponen proses yang keberadaanya juga sangat menentukan kelulusan siswa yang dapat memenuhi

Kebutuhan industri pariwisata atau hotel khususnya, selaras yang disampaikan Wahjoetomo (Manajemen Perti, 1995) “komponen proses ini merupakan tahap berikutnya dari komponen input dari sistem manajemen perguruan tinggi, yakni sebagai bagian dari kegiatan yang amat menentukan dalam mengembangkan kondisi input, khususnya menyangkut potensi mahasiswa serta upaya pengembangan lembaga perguruan untuk menciptakan kualitas lulusan yang bernilai tinggi.

Menurut Tilaar menegaskan lagi “Upaya yang harus dilakukan dalam membenahan komponen proses dalam manajemen perguruan tinggi yang efisien adalah berusaha meningkatkan kualitas proses tersebut pada tiap-tiap unsur penduduknya, yaitu unsur tenaga pengajar (dosen), proses belajar mengajar, kurikulum sarana, sumber daya (termasuk potensi karyawan) dan dana”.

Unsur tenaga pengajar. Jika lembaga pendidikan itu ingin menghendaki terwujudnya siswa yang bermutu, langka pertama yang perlu diwujudkan adalah merekrut tenaga pengajar yang bermutu dan memiliki pengalaman di bidang perhotelan, artinya tenaga pengajar untuk lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini sangat membutuhkan tenaga pengajar

yang praktisi dari industri hotel dan berlatar belakang pendidikan minimal D.III.

Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi tenaga pengajar dalam sistem pendidikan tinggi sebagai inti dari mesin produksi dalam manajemen pendidikan.

Kendala-kendala yang meliputi kualifikasi tenaga pengajar diantaranya adalah masih rendahnya reward yang diberikan terhadap profesi ini, akibatnya profesi tenaga pengajar justru kompetisinya dengan profesi lain tidak beruntung, karena profesi lain dapat memberikan harapan atau idaman reward yang lebih baik, sehingga SDM yang potensial lebih banyak terserap dengan profesi lain (bukan profesi tenaga pengajar).

Oleh karena itu solusi alternatifnya adalah setiap lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini harus memperhatikan reward dan kesejahteraan tenaga pengajarnya demi meningkatkan motivasi dan kreatifitas tenaga pengajar, mengingat hubungan kesejahteraan dan motivasi kerja adalah sangat signifikan.

Pendapat Tilaar (1994) "Apabila masyarakat mampu memberikan penghargaan material maupun spiritual yang wajar bagi seorang dosen yang disertai pula dengan pembinaan mental agar

pandai-pandai bersyukur dan bekerja adalah ibadah, maka profesi ini dengan sendirinya akan menarik putra-putra terbaik bangsa untuk memasuki profesi tersebut".

Selain dari itu, sistem pengembangan karir bagi tenaga pengajar semestinya lebih dikedepankan, yaitu melalui program pendidikan lanjut, seperti program akta V atau Applied Approach, mengingat tenaga pengajar untuk pendidikan ini masih banyak diambil dari tenaga praktisi industri-industri pariwisata, yang kemampuan pola proses pengajarannya masih dikatakan kurang sekali. Sehingga strategi pengajaran ini perlu diberikan dan diketahui oleh setiap tenaga pengajar di lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini, dengan mengikuti program diklat satu minggu atau lebih yang bisa diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang sudah ada seperti IKIP atau Universitas yang memiliki program Applied Approach.

Alternatif lain pemerintah semestinya juga memberikan porsi subsidi yang cukup bagi pengembangan lembaga ini, sehingga tidak terkesan di anak tirikan, "Banyak pengelola kursus dan lembaga keterampilan mengeluh karena mereka masih

dipandang dengan sebelah mata. Bahkan kerap dipandang sebagai anak tiri dalam sistem pendidikan di Indonesia". Oleh karena itu pemerintah harus bisa menepis dan harus sungguh-sungguh memperhatikan keberadaan lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini, mengingat dari data statistic, "saat ini ada 20.000 lembaga PLS dengan 200 program."

Komponen Output, Output yang dimaksud adalah kelulusan siswa/alumni, yang mana komponen output senantiasa sangat tergantung pada potensi yang dimiliki komponen input dan kualitas proses di dalam sistem pengajaran di Pendidikan Luar Sekolah. Kualitas kompoen output ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh beberapa indikasi, yaitu kuantitas dan kualitas kelulusan, relevansi, tingginya tingkat keserapan alumni dalam kegiatan pembangunan nasional, sehingga alumni PLS ini untuk mengetahui kualitas outputya salah satunya dilihat dari tingginya prosentase lulusan yang diterima di industri pariwisata.

Oleh Karena itu yang perlu diperhatikan bagi lembaga Pendidikan Luar Sekola ini adalah membentuk organisasi alumni yang dapat menjadi wadah bagi alumni sendiri dan dapat bermanfaat sebagai pusat informasi

apabila ada alumni yang masih belum memiliki pekerjaan, dan sekaligus manfaat dari organisasi ini bisa memberikan sharing pengalaman antara alumni satu yang bekerja di suatu industri dengan alumni lainnya yang juga bekerja di tempat/industri lainnya.

2.2 Kompetisi Lembaga Diklat Bidang Pariwisata

Melihat dari data statistik menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja di sub sektor pariwisata sebesar 9000.279 orang atau 7,6% dari keseluruhan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia dala kurun waktu empat tahun terakhir.

Sekaligus Penelitian Lemlit Unmer Malang dengan Depnaker tentang Studi Kompetisi Sektoral Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Sub Sektor Pariwisata menghasilkan "Berdasar pada perencanaan pengembangan tenaga kerja pada setiap tingkat diperlukan tambahan sebesar 5% untuk level managerial, 30% untuk supervisor dan 60% untuk level-level dasar (basic)"

Dapat diartikan bahwa kebutuhan tenaga kerjanya, 60% menunjukkan angka yang paling tinggi dari angka-angka lainnya dengan posisi atau jabatan lainnya

biasanya tenaga kerja untuk level ini yang dibutuhkan adalah keterampilan di bidang operasional perhotelan dan berpendidikan D I atau program satu tahun.

Dipertegas lagi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tahun 2006 bahwa "Dewasa ini Indonesia telah terdapat lembaga pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata sebanyak 300 institut, dan 120 di antaranya merupakan lembaga diklat formal pada level sekunder dan tersier, dari lembaga diklat tersebut dapat dihasilkan rata-rata lulusan pertahun rata-rata 30.000 tenaga kerja, yang mana sebagian besar dari mereka memiliki kualifikasi sederajat SMU/SMK dan kurang mampu berkomunikasi Internasional sementara itu kebutuhan tenaga kerja bidang pariwisata pertumbuhannya mencapai 20.000 orang saja pertahun. Gejala ini memberikan petunjuk bahwa dari apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan sudah cukup tetapi permasalahannya adalah tingkat keterampilannya.

Lembaga Pendidikan Luar Sekolah bidang pariwisata disini dapat menjawab tantangan tersebut secara kualitatif secara umum dan informal lembaga ini memiliki level di atas SMU sehingga kemampuan komunikasi

dan psikologi lembaga ini sudah dianggap cukup matang, dari segi umur atau dari segi pemikiran akan tetapi masih ingin dalam kontek tenaga kerja di bawah supervis, sehingga perhatian serius terhadap kelulusan ini perlu dipertimbangkan.

Sejalan dengan pemikirannya DR. James J. S (1994, Hal.102) menyatakan bahwa "Dunia pendidikan seperti Akademik Pariwisata terus terang harus diakui memang belum atau tidak mengarah ke tingkat itu. Misalna, hal yang mengarah ke hal yang sering dikeluhkan, seperti Food & Beverage. Dalam hal ini sering kurang. Sehingga masih dipakai tenaga asng. Sekarang tinggal bagaimana kita memberi pola yang efektif terhadap lembaga-lembaga pendidikan pariwisata yang ada di Indonesia khususnya PLS untuk memformat kurikulum secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Industri perhotelan.

2.3 Standar Kualifikasi Keterampilan

Penetapan standar kualifikasi keterampilan untuk Pendidikan Luar Sekolah bidang pariwisata masih dikategorikan keterampilan teknis tingkat supervisor ke bawah sehingga pelatihan

pendidikan yang hanya diberikan selama satu tahun harus betul-betul memberikan keterampilan teknis dasar yang ada di industri perhotelan.

Agar siswa dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pendidikan dan latihan nanti maka lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini harus memperhatikan standar kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh industri perhotelan dan agar terjadi hubungan antara dunia kerja dan dunia pendidikan yang selama ini masih dipertanyakan.

Sehingga solusi pemecahannya adalah lembaga pendidikan harus mengetahui standar kualifikasi keterampilan yang dikeluarkan oleh Deparpostel sebagai dasar penyusunan kurikulum lembaga pendidikan bidang pariwisata yang sekaligus dapat dilaksanakan dan diaplikasikan di industri perhotelan, mengingat industri perhotelan dalam praktek operasionalnya juga mengacu atau merujuk terhadap standar kualifikasi keterampilan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari tentang persyaratan fisik tinggi badan untuk siswa yang ingin masuk di lembaga Pendidikan Luar Sekolah dalam bidang pariwisata, baik itu perempuan atau laki-laki adalah 50% PLS menyatakan sangat penting

artinya persyaratan yang harus diterapkan untuk menseleksi calon siswa baru, dan sisanya 50% PLS menyatakan biasa saja artinya tidak begitu penting tapi bila calon siswa yang mendaftar melebihi target yang ditetapkan maka dianggap perlu akan tetapi, bila jumlah calon siswa atau pendaftar masih kurang dari target yang ditetapkan maka persyaratan itu bisa dikesampingkan.

Hasil dari untuk Industri Perhotelan dalam persyaratan fisik tinggi badan yang dibutuhkan pihak Perhotelan untuk calon pegawai adalah 100% menyatakan sangat penting artinya pihak hotel sangat sangat membutuhkan karyawan dalam hal ini adalah bentuk fisik yaitu tinggi badan bagi wanita atau laki-laki, dan tak satu hotel pun yang menyatakan tidak penting, dan pihak hotel menginginkan untuk laki-laki tinggi badan minimal 165 Cm dan untuk perempuan minimal 155 Cm.

Dari hasil kedua lembaga ini sangat menarik jika dilakukan pembahasan yang lebih rasional antara hubungan keduanya, mengingat dari kedua obyek tersebut sangat membutuhkan, hotel membutuhkan tenaga terdidik untuk karyawannya dan PLS membutuhkan Outputnya

diterima di industri perhotelan secara maksimal. Dan bila disimak dari hasil penelitian tersebut apa yang diharapkan hotel untuk persyaratan fisik (tinggi badan) yaitu 100% hotel mengharapkan sekali tapi 50% PLS masih menyediakan harapan tersebut, sehingga perlu adanya perhatian bagi PLS dalam memberi seleksi terhadap calon siswa untuk nantinya bisa diterima oleh industri hotel secara maksimal.

Persyaratan tinggi badan ini bisa dikatakan mutlak mengingat hotel adalah salah satu jenis usaha jasa yang melayani tamu dan setiap saat bertemu dengan tamu sehingga performance dari orang yang melayani tersebut harus menarik dan tidak cacat khususnya apabila karyawan tersebut bekerja pada bidang Front Office atau bagian Service. Hasil yang diperoleh tentang persyaratan fisik kebersihan kulit untuk siswa yang ingin masuk di lembaga Pendidikan Luar Sekolah dalam bidang pariwisata, baik itu perempuan atau laki-laki adalah : 50% PLS menyatakan sangat penting artinya persyaratan yang harus ada dan diterapkan bagi seleksi calon siswa harus ada dan 50% PLS menyatakan penting artinya bisa perlu mengingat kebersihan kulit ini tidak terlalu mutlak kecuali calon siswa

memiliki penyakit.

Hasil dari yang sama untuk Industri Perhotelan dalam persyaratan fisik kebersihan kulit yang dibutuhkan pihak perhotelan untuk calon pegawai adalah 25% menyatakan sangat penting artinya pihak hotel sangat membutuhkan karyawan dalam hal ini adalah bentuk fisik yaitu, kebersihan kulit perlu diperhatikan bagi wanita atau laki-laki, dan 75% menyatakan penting dalam hal batas yang wajar asal tidak memiliki penyakit kulit yang mengganggu kesehatan orang lain.

Dari hasil kedua lembaga ini sangat menarik jika dilakukan pembahasan yang lebih dalam antara hubungan keduanya, mengingat dari kedua obyek tersebut sangat membutuhkan. Dan bila disimak dari hasil penelitian tersebut apa yang diharapkan hotel untuk persyaratan fisik (kebersihan kulit) yaitu 50% hotel mengharapkan sekali dan, 50% PLS sudah menyatakan hal yang sama, sisanya baik dari hotel dan dari PLS adalah kebersihan kulit 50% dari PLS dan 25% dari hotel menyatakan biasa asal bukan berpenyakit kulit, akan tapi tetap bagi PLS dalam memberi seleksi terhadap calon siswa untuk memperhatikan (kebersihan kulit atau orang yang tidak berpenyakit kulit) hal ini agar nantinya lulusan

bisa diterima oleh industri hotel secara maksimal.

Persyaratan kebersihan kulit ini bisa dikatakan hal biasa bukan hal yang mutlak dengan catatan bukan penyakit kulit yang menular mengingat hotel adalah salah satu jenis usaha jasa yang kerap berhadapan dengan pelayanan tamu dan setiap saat menyajikan makanan dan minuman kepada tamu sehingga kebersihan diri dan performen dari orang yang melayani tersebut harus menarik dan tidak berpenyakit khususnya apabila karyawan tersebut bekerja pada bidang Food Product atau Food Service.

Hasil yang diperoleh tentang persyaratan fisik bentuk rambut untuk siswa yang ingin masuk di Lembaga Pendidikan Luar Sekolah dalam Bidang Pariwisata, baik itu perempuan atau laki-laki adalah : 25% PLS menyatakan sangat penting artinya persyaratan yang harus ada dan diterapkan bagi seleksi calon siswa memiliki rambut yang bagus (subur, hitam, dan rapi), dan 75% PLS menyatakan penting artinya biasa dan tidak terlalu ditekankan asal-rambut rapi tidak terlalu panjang bagi siswa laki-laki.

Hasil dari Industri Perhotelan dalam persyaratan fisik (bentuk rambut) yang dibutuhkan pihak perhotelan untuk calon pegawai

adalah 100% menyatakan penting artinya masih tergolong biasa asal tidak terlalu panjang sesuai dengan kerapian seseorang untuk laki-laki atau perempuan, karena pihak hotel hanya membutuhkan karyawan dalam hal ini adalah bentuk rambut yang rapi.

Dari hasil kedua lembaga PLS dan Industri hotel ini sangat menarik jika dilakukan pembahasan antara hubungan keduanya. Dan bila disimak dari hasil penelitian tersebut apa yang diharapkan hotel untuk persyaratan fisik (bentuk rambut) yang dikatakan rapi tersebut di atas yaitu Industri Hotel berharap lebih baik kalau rambut itu terawat baik dan rapi, sehingga perlu ian bagi PLS dalam memberi seleksi terhadap calon siswa terhadap bentuk rambut yang diharapkan pihak industri yang nantinya kelulusannya bisa diterima oleh industri hotel.

Persyaratan bentuk rambut yang dikatakan baik adalah rapi dan terawat bagi laki-laki panjang rambut tidak melebihi kerah baju atau kaos dan perempuan tidak melebihi punggung, dan harus dirawat tidak boleh acak-acakan atau tidak pernah disisir atau banyak ketombe.

Hasil yang diperoleh tentang orang yang melaksanakan psikotes terhadap calon siswa dan siswa yang ingin masuk Lembaga

Pendidikan Luar Sekolah dalam Bidang Pariwisata, ada atau tidak psikotest ini, adalah : 75% PLS tidak dilaksanakan artinya persyaratan tes seperti ini tidak diadakan, dan 25% seleksi calon siswa dengan cara ini dilaksanakan dan oleh ahlinya.

Dari hasil temuan ini Lembaga PLS ini sebenarnya sangat penting bila mengadakan psikotes yang mengarah pada tes keterampilan dan tes terhadap minat seta bakat calon siswa. Dan tes seperti ini secara professional harus dilakukan oleh ahlinya yaitu seorang Psikolog.

Proses pendidikan ini memberikan gambaran tentang materi perkuliahan yang diberikan, proses belajar mengajar, manajemen lembaga dan fasilitas-fasilitas yang menunjang terhadap proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas atau yang disebut praktek.

Hasil yang diperoleh tentang nama jurusan yang digunakan bagi PLS bidang Pariwisata, adalah: 50% PLS memakai nama jurusan Perhotelan dan Pariwisata, dan 50% lagi menggunakan nama jurusan Perhotelan, hal yang variasi ini menimbulkan masyarakat akan bingung untuk menentukan perbedaan dari kedua nama tersebut, oleh karena itu banyak untuk menentukan mana yang

tepat adalah kondisi jurusan itu sendiri artinya bila PLS tersebut ingin konsentrasi terhadap masalah-masalah khusus perhotelan nama jurusan yang tepat adalah Perhotelan dan jika PLS tersebut ingin konsentrasi terhadap masalah-masalah Tours and Traavel, nama jurusan yang tepat adalah Jurusan Usaha Perjalanan (sesuai dengan lembaga resmi D.III Pariwisata), dengan kata lain nama dari keduanya tidak boleh dibuat bersama-sama, dan harus disendirikan yaitu PLS Jurusan Perhotelan dan atau PLS Jurusan Pariwisata.

Hasil yang diperoleh tentang jumlah orang yang menjadi staf pengajar adalah 50% lebih dari sepuluh dan 50% kurang dari sepuluh. Sehingga dapat dikatakan apabila jumlah dosen kurang dari sepuluh dan jumlah materi yang diberikan lebih dari sepuluh ini berarti kurang efektif karena ada dosen yang masih merangkap mengajar ini berarti tidak memiliki spesialisasi.

Idealnya satu materi satu dosen, sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesiapan dan kematangan tenaga pengajar dan memberikan spesialisasi terhadap dosen tersebut.

Hasil yang diperoleh tentang kualifikasi tenaga pengajar, adalah

: 75% PLS ini mengambil dari kalangan praktisi dan 25% PLS mengambil tenaga pengajar dari Praktisis dan Berpendidikan formal Diploma III.

Hasil yang diperoleh oleh dari hasil laboratorium 75% PLS memiliki laboratorium untuk praktek siswa di kampus dan 25% PLS yang masih belum memiliki laboratorium, mengingat laboratorium ini sangat penting bagi jalannya proses belajar dan pengajaran, apalagi PLS ini adalah bidang pariwisata yang banyak memerlukan keterampilan.

Hasil yang diperoleh dari pentingnya Bahasa asing (B, 1 s/d 6) di bidang ini adalah :

1. Bahasa Inggris dari PLS 100% di berikan artinya siswa dapat materi ini secara mutlak/pokok dan bagi Industri Hotel manfaatnya adalah 100% di perlukan sehingga keduanya klop dan tidak ada permasalahan yang harus dipecahkan.
2. Bahasa Jepang dari PLS 100% di berikan artinya siswa dapat materi ni secara pilihan tapi tetap diperhatikan dan bagi Industri Hotel memanfaatnya adalah 75% diperlukan untuk komunikasi terhadap tamu sehingga keduanya masih ada selisih sedikit dan perlu adanya pembahasan permasalahan sedikit untuk dirumuskan lagi.
3. Bahasa Perancis dari PLS 25% di berikan artinya siswa dapat materi ini secara pilihan bukan mutlak/pokok dan bagi Industri Hotel manfaatnya adalah 25% diperlukan sedikit saja sehingga keduanya persis memiliki hasil yang sama dan tidak ada permasalahan yang dari keduanya.
4. Bahasa Mandarin dari PLS 25% diberikan artinya siswa dapat materi ini tidak secara mutlak/pokok dan bagi Industri Hotel manfaatnya adalah 50% di perlukan dalam komunikasi dengan tamu dari negara Cina, sehingga keduanya masih belum serasi da bagi PLS harus dapat memperhatikan terhadap tingginya manfaat bahasa asing ni, yang akhir-akhir in sedang ramai dipelajari di berbagai perusahaan.
5. Bahasa Belanda dari PLS 25% diberikan artinya siswa dapat materi ini tidak secara mutlak/pokok dan bagi Industri Hotel manfaatnya adalah 50% di perlukan dan frekuensi penggunaanya sehingga keduanya masih belum serasi dan perlu diserasikan artinya PLS harus dapat memperhatikan tingginya frekuensi penggunaan Bahasa Belanda ini di Industri Perhotelan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad Lincolin, *Ekonomi manajerial (Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis)*, BPFE, Yogyakarta, 1993
- Deparpostel, *Standar Kualifikasi Keterampilan (SKK) Tingkat Menengah Bidang Pariwisata*, Jakarta 2006
-, *Pedoman Akreditasi Nasional Program Diploma*, Jakarta, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Manajemen, Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Buku saku kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*, Jakarta, 2009
- <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-non-formal>
- <http://researchengines.com/isjoni13.html>
- <http://metronews.fajar.co.id/read/81421/10/mendiknas-tertibkan-lembagana-nakal>
- Holker Helmut, Pendidikan Kejuruan, Pengajaran, *Kurikulum Perencanaan*, Gramedia, Jakarta
- Soekardiono, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage)*, Gramedia, Jakarta, 1996
- Spillane, James J, *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan Kanisius*, Yogyakarta, 1994
- Wahab Salah, *Manajemen Pariwisata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Wahyoetomo, *Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi*, Gramedia, Jakarta, 1995